



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 36 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penyempurnaan kelembagaan guna mencapai efektifitas, optimalisasi, dan strategi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan dan penataan kembali struktur kelembagaan yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO,

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah

- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

- (a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;

- (b) Sub Bagian Pembinaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan;

- (c) Sub Bagian Keagrariaan.

2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

- (a) Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan;

- (b) Sub Bagian Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana;

- (c) Sub Bagian Sosial dan Keagamaan.

3. Bagian Administrasi Kemasyarakatan

- (a) Sub Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik;

- (b) Sub Bagian Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;

- (c) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.

4. Bagian Administrasi Kerjasama dan Penghubung Daerah

- (a) Sub Bagian Kerjasama Antar daerah;
 - (b) Sub Bagian Penghubung Pemerintah Provinsi;
 - (c) Sub Bagian Penghubung Pemerintah Pusat .
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan :
1. Bagian Administrasi Pengembangan Potensi Daerah
 - (a) Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - (b) Sub Bagian Penanaman Modal;
 - (c) Sub Bagian Promosi Daerah.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan
 - (a) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Statistik;
 - (b) Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - (c) Sub Bagian Pekerjaan Umum.
 3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
 - (a) Sub Bagian Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - (b) Sub Bagian Peternakan dan Perikanan;
 - (c) Sub Bagian Kehutanan dan Perkebunan, dan Lingkungan Hidup.
 4. Bagian Administrasi Perekonomian
 - (a) Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - (b) Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan;
 - (c) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah.
- d. Asisten Administrasi Umum :
1. Bagian Hukum dan Perundang-undangan
 - (a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum;
 - (b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - (c) Sub Bagian Tindak Lanjut.
 2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
 - (a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - (b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan;
 - (c) Sub Bagian Evaluasi Kinerja Daerah.
 3. Bagian Umum
 - (a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

- (b) Sub Bagian Perlengkapan;
 - (c) Sub Bagian Keuangan.
4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
- (a) Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan;
 - (b) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
 - (c) Sub Bagian Santel dan Pengolahan Data Elektronik.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 12 November 2011
BUPATI WAJO,

TTD
ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 12 November 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD
ANDI WITMAN HAMZAH

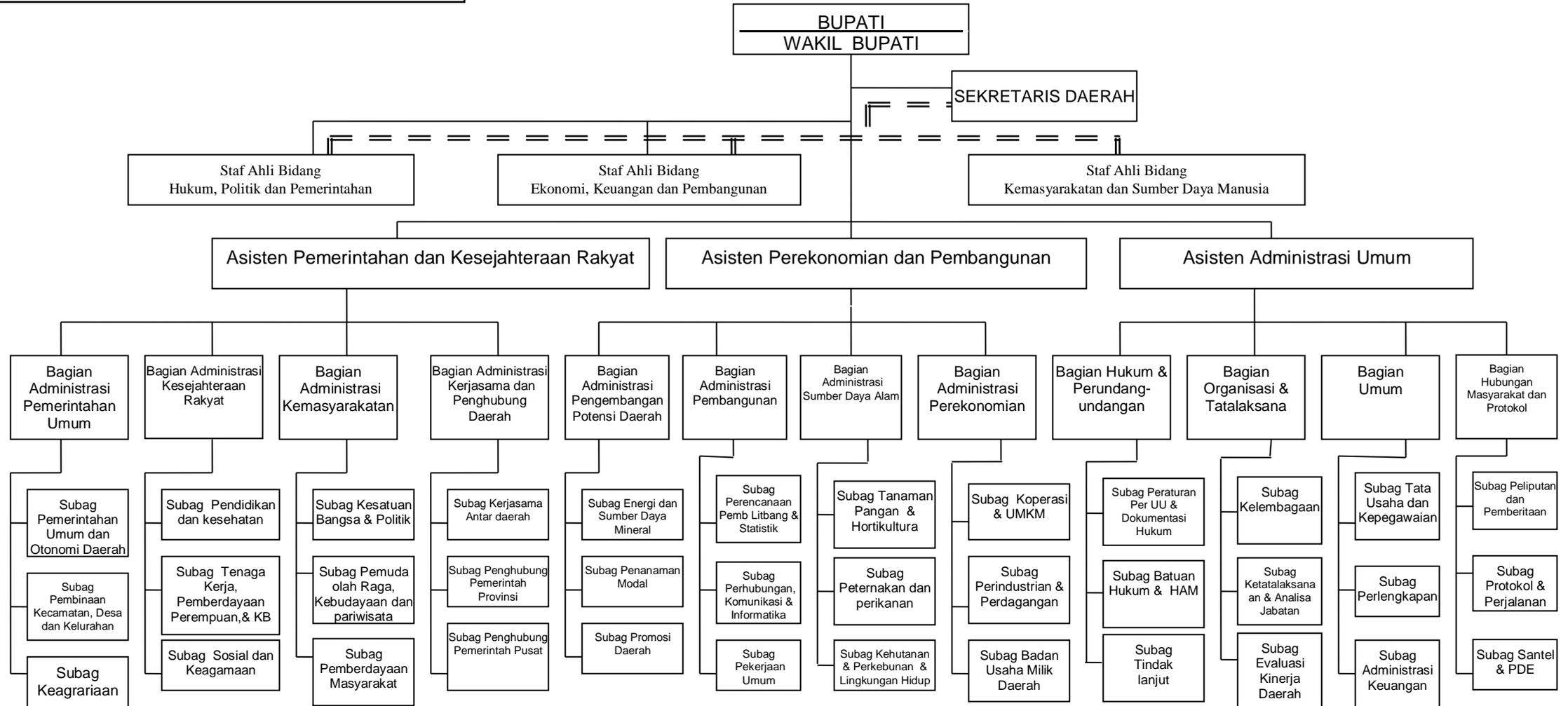
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2011 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag Hukum dan HAM

TTD
ABD. HAMID, S.H.,M.H

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Wajo
 Nomor : 36 Tahun 2011
 Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Wajo

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WAJO



Keterangan: _____ : Garis Komando
 = = = = : Garis Koordinasi

BUPATI WAJO

ttd.

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU